

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

Profil LPP RRI

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara. RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Siaran RRI sampai saat ini ditujukan bagi kepentingan bangsa dan negara. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan

Visi dan Misi LPP RRI

LPP RRI memiliki visi “Menjadikan Layanan Penyiaran Publik Radio Republik berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia”. Adapun misi LPP RRI antara lain:

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka
10. Memperluas jejaring dan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tugas dan Fungsi LPP RRI

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya RRI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

Profil LPP RRI Mataram

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Mataram merupakan Lembaga Penyiaran yang paling senior berkecimpung berperan membangun Bumi Gora NTB, tidak pernah lekang oleh waktu hingga kini, terus mengudara dengan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Daerah ini. RRI Mataram berdiri secara resmi pada tahun 1960 dengan kekuatan daya jangkau siaran yang masih terbatas. Namun demikian semangat juang angkasawan-angkasawati RRI Mataram tidak pernah mengenal lelah, kendati dengan keterbatasan itu, dengan Tim work yang bekerja dengan tulus ikhlas.

Karena itu tidak heran nama-nama reporter dan penyiar di masa lampau, hingga kini masih tetap dalam ingatan pendengarnya. Dari rumah Tiga Dara, rumah yang arsitek dan bangunannya sama yaitu rumah tiga buah berjajar di Jalan Langko 83, disanalah RRI Mataram mulai mengudara. Peresmian beroperasinya berlangsung pada tanggal 31 Desember 1960. Penyiar dan reporter yang tidak pernah terlupakan hingga kini, semenjak beroperasinya pada tahun 1960, adalah Alm. H. Idris MZ, Alm. Syam Chandra, Victoria T, Elsy Magdalena, H.Bochri Rachman, H. Hadjar AS, H.Mahdan. Sosok inilah yang menjadi angkasawan dan angkasawati RRI Mataram yang terus melayani masyarakat semenjak tahun 1960, dengan seorang tehniisi yang menjadi penopang utama pemancar dan antena R. Pangestu.

Acara yang sangat digemari semenjak tahun 1960, terutama pendengar di Lombok dan Sumbawa, adalah Siaran Pedesaan, Pelangi NTB, Sandiwara Radio Bahasa Sasaq, dan Wayang Kulit, di samping acara Berbalas Pantun dan acara hiburan lainnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi berguna dalam membantu pencapaian tujuan dan fungsi organisasi supaya pelaksanaan kinerja berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk mengetahui pembagian pekerjaan, hubungan antar bidang, batasan tanggung jawab dan wewenang, dan pembagian fungsi sesuai bidang masing-masing. Satuan kerja LPP RRI Mataram memiliki dan membawahi bidang antara lain :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program Siaran
3. Bidang Pemberitaan
4. Bidang Teknologi dan Media Baru
5. Bidang Layanan dan Pembembangan Usaha

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	861.600.000
Jumlah Pendapatan	-	861.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	9.272.203.000	9.272.203.000
Belanja Barang	2.890.732.000	2.890.732.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	12.162.935.000	12.162.935.000

Realisasi Pendapatan
Rp91.450.832

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp91.450.832 atau mencapai 10,61 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp861.600.000. Pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp91.450.832. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan terjadi karena ada kenaikan pendapatan jasa siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting dari tahun sebelumnya, adanya sewa lahan pemancar Tegal serta adanya pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu atas Temuan SPI berupa: Pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan figura bingkai foto tahun 2022, pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi rumah dinas tahun 2022, pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi auditorium CV. Putra Jaya tahun 2022 serta adanya pengembalian belanja telpon internet air tahun 2023. Pendapatan denda dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran PNPB dari Adira berdasarkan PKS No.71/PKS/RRR-MTR/04/2024. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	861.600.000	91.450.832	10,61
Jumlah	861.600.000	91.450.832	10,61

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 167,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	91.450.832	34.215.181	167,28
Jumlah	91.450.832	34.215.181	167,28

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp91.450.832*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp91.450.832 dan Rp34.215.181. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 167,28 dari TA 2023. Kenaikan terjadi karena ada kenaikan pendapatan jasa siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting dari tahun sebelumnya, adanya sewa lahan pemancar Tegal serta adanya pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu atas Temuan SPI berupa: Pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan figura bingkai foto tahun 2022, pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi rumah dinas tahun 2022, pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan renovasi auditorium CV. Putra Jaya tahun 2022 serta adanya pengembalian belanja telpon internet air tahun 2023. Pendapatan denda dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran PNPB dari Adira berdasarkan PKS No.71/PKS/RRI-MTR/04/2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	91.450.832	34.215.181	167,28
Jumlah	91.450.832	34.215.181	167,28

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.857.940	275.181	575,17
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	83.560.000	33.940.000	146,20
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	40.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.992.892	-	-
Jumlah	91.450.832	34.215.181	167,28

*Realisasi Belanja
Rp5.666.516.501*

B.2 Belanja

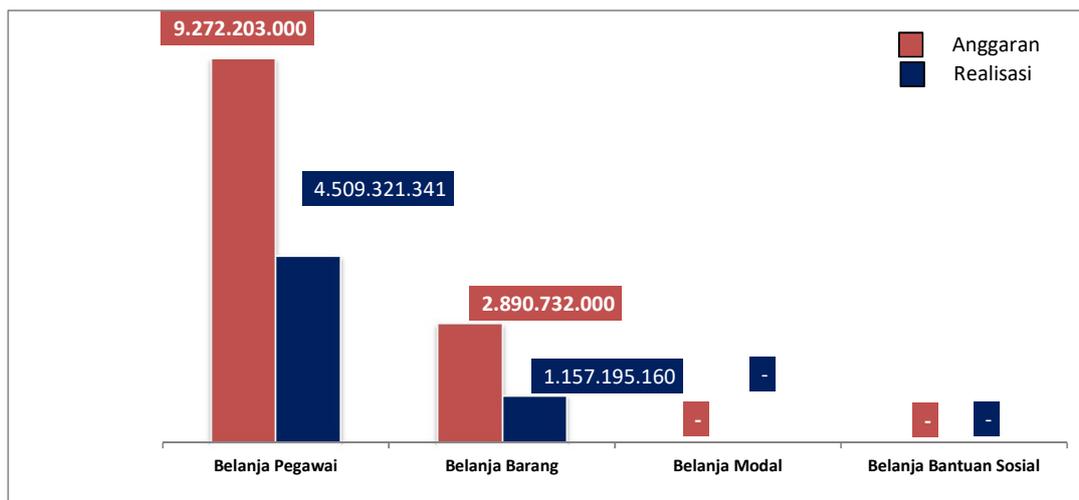
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp5.666.516.501 atau 46,59 % dari anggaran belanja sebesar Rp.12.162.935.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	9.272.203.000	4.509.321.341	48,63
Belanja Barang	2.890.732.000	1.157.195.160	40,03
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	12.162.935.000	5.666.516.501	46,59

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,14% Kenaikan Belanja Pegawai PPPK dikarenakan adanya penerimaan pegawai PPPK sebanyak 9 Pegawai. Kenaikan Belanja Uang Lembur dikarenakan adanya akun uang lebur kegiatan ramadhan. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	4.509.321.341	3.812.108.108	18,29
Belanja Barang	1.157.195.160	1.477.015.276	(21,65)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5.666.516.501	5.289.123.384	7,14

Realisasi Belanja Pegawai
Rp4.509.321.341

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.509.321.341 dan Rp3.812.108.108. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,29 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Kenaikan Belanja Pegawai PPPK dikarenakan adanya penerimaan pegawai PPPK sebanyak 9 Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	948.116.900	995.258.220	(4,74)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.670	15.007	(8,91)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76.790.720	77.192.958	(0,52)
Belanja Tunj. Anak PNS	20.379.418	19.283.106	5,69
Belanja Tunj. Struktural PNS	24.040.000	15.090.000	59,31
Belanja Tunj. Fungsional PNS	65.816.000	85.736.000	(23,23)
Belanja Tunj. PPh PNS	21.796.497	9.193.413	137,09
Belanja Tunj. Beras PNS	47.217.840	51.345.780	(8,04)
Belanja Uang Makan PNS	91.058.000	125.968.000	(27,71)
Belanja Tunjangan Umum PNS	25.885.000	28.665.000	(9,70)
Belanja Uang Lembur	32.975.000	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	939.012.463	819.426.375	14,59
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	398.271.270	336.027.000	18,52
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	54.130.574	51.459.620	5,19
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS	47.180.000	61.516.000	(23,30)
Beban Gaji Pokok PPPK	778.589.800	520.868.800	49,48
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.058	4.464	237,32
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	55.609.360	38.365.264	44,95
Beban Tunjangan Anak PPPK	17.563.356	13.753.232	27,70
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	109.740.000	79.840.000	37,45
Beban Tunjangan Beras PPPK	54.459.840	42.872.640	27,03
Beban Tunjangan Uang Makan PPPK	111.587.000	64.792.000	72,22
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	589.286.089	375.975.414	56,74
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	4.509.533.855	3.812.648.293	18,28
Pengembalian Belanja Pegawai	212.514	540.185	(60,66)
Jumlah Belanja	4.509.321.341	3.812.108.108	18,29

Realisasi Belanja
Barang
Rp1.157.195.160

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.157.195.160 dan Rp1.477.015.276. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 21,65% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan/penurunan Belanja Barang dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan belanja jasa dan penurunan belanja barang operasional dan adanya penurunan perjalanan dinas pegawai dan perjalanan sehubungan penyiaran.

Penurunan Belanja Barang Operasional dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Barang Operasional Lainnya pada bidang Siaran ataupun Pemberitaan.

Penurunan Realisasi Belanja Pemeliharaan dikarenakan adanya penurunan anggaran pada Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Peralatan Fungsional.

Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Perjalanan Dinas Biasa; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan bidang Siaran dan Pemberitaan; dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota kegiatan bidang LPU.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	40.828.000	80.252.868	(49,13)
Belanja Barang Non Operasional	94.366.000	91.359.628	3,29
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34.064.713	59.521.000	(42,77)
Belanja Jasa	507.958.501	780.938.322	(34,96)
Belanja Pemeliharaan	371.222.716	406.657.218	(8,71)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	108.755.230	58.286.240	86,59
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.157.195.160	1.477.015.276	(21,65)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.157.195.160	1.477.015.276	(21,65)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

B.2.5.1 Capaian Rincian Output Per Fungsi

Berdasarkan Rencana Kerja (RKT) tahun 2024 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram terdapat alokasi anggaran dengan pagu mencapai Rp 12.162.935.000,- dan realisasi sebesar Rp 5.666.729.015,-.

Rincian kertas kerja capaian output per fungsi periode Semester I tahun 2024 di RRI Mataram Akan dijelaskan pada lampiran berikut ini :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA									
TAHUN ANGGARAN 2024									
Kementerian/Lembaga	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia								
Unit Organisasi	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia								
Satuan Kerja	: RRI Mataram								
Fungsi	: Penyiaran Publik								
Sub Fungsi	: Pelayanan Umum								
Program	: Program Penyiaran Publik								
Lokasi	: Mataram								
Kode	Kegiatan	BELANJA			KELUA				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
01	PELAYANAN UMUM	12.162.935.000	5.666.518.115	46,59%					
90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	12.162.935.000	5.666.518.115	46,59%					
GC	Program Penyiaran Publik	1.009.142.000	398.489.000	39,49%					
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	1.009.142.000	398.489.000	39,49%					
AEC	Kerja sama	91.439.000	64.251.000	70,27%					
001	Layanan Pengembangan Usaha, Peran Humas dan Branding Satker Daerah	91.439.000	64.251.000	70,27%	1	1	Kesepakatan	98%	NON PN
BMA	Data dan Informasi Publik	728.470.000	247.468.000	33,97%					
001	Penunjang Siaran Lokal Regional dan Nasional (Regular)	514.005.000	208.885.000	40,64%	1	0	Layanan	51,23%	NON PN
U01	Program Siaran Dialog Interaktif didalam Studio	24.529.000	7.060.000	28,78%	19	9	Layanan	43,98%	NON PN
U02	Program Siaran Dialog Interaktif diluar Studio	36.736.000	10.166.000	27,67%	7	4	Layanan	48,39%	NON PN
U04	Program Produksi Buletin Berita	57.660.000	4.400.000	7,63%	62	28	Layanan	48,4%	NON PN
U05	Program Siaran Produksi Feature	1424.000	0	0%	2	0	Layanan	5%	NON PN
U06	Program Produksi Laporan Mendalam	6.360.000	352.000	5,53%	6	3	Layanan	49,99%	NON PN
U07	Program Siaran Langsung Reportase	24.312.000	2.112.000	8,69%	12	6	Layanan	41,66%	NON PN
U08	Program Produksi Majalah Udara	992.000	264.000	26,61%	1	1	Layanan	31,61%	NON PN
U09	Program Siaran Kuis	6.480.000	0	0%	15	0	Layanan	5%	NON PN
U10	Program Produksi Sandiwara Radio	3.878.000	0	0%	2	0	Layanan	5%	NON PN
U11	Program Siaran Pergelaran	30.960.000	12.481.000	40,31%	2	1	Layanan	50%	NON PN
U14	Program Produksi Kaleidoskop	1643.000	0	0%	1	0	Layanan	5%	NON PN
U17	Program Produksi Report On The Spot (ROS)	12.556.000	960.000	7,65%	146	78	Layanan	41,1%	NON PN
U18	PROGRAM SIARAN DAN PELAYANAN	2.000.000	0	0%	1	0	Layanan	5%	NON PN

U18	PEDEKATAN DEVELOPMENT BROADCASTING UNIT (DBU)	3.203.000	0	0%	1	0	Layanan	5%	NON PN
U19	PROGRAM SIARAN WAWANCARA	3.732.000	788.000	21,11%	6	2	Layanan	35,2%	NON PN
QMA	Data dan Informasi Publik	189.233.000	86.770.000	45,85%					
003	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	94.176.000	43.627.500	46,33%	1	0	Layanan	50,02%	PN
005	Dialog Pasca Pemilu	95.057.000	43.142.500	45,39%	67	38	Layanan	50,98%	PN
WA	Program Dukungan Manajemen	11.153.793.000	5.268.029.115	47,23%					
5136	Pengelolaan Keuangan LPP RRI	11.153.793.000	5.268.029.115	47,23%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.153.793.000	5.268.029.115	47,23%					
994	Layanan Perkantoran	11.153.793.000	5.268.029.115	47,23%	2	1	Layanan	47,79%	NON PN

B.2.5.2 Capaian Output Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada RRI Mataram terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhanm dan transformasi pelayanan public. Dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

B.2.5.2.1 Prioritas Nasional VI – Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pelaksanaannya di antaranya melalui Data dan Informasi Publik program prioritas yaitu Program Produksi Tanggap Bencana Prioritas Nasional, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan prioritas yaitu Dialog Interaktif Dalam Studio Tanggap Bencana; Filler Tanggap Bencana, Spot Tanggap Bencana dan Tips Tanggap Bencana, yang tersebar di Satuan Kerja LPP RRI Mataram dengan pagu mencapai Rp. 94.176.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.627.500,- Dengan Rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Unit Organisasi	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja	: RRI Mataram

Kode	Kegiatan	BELANJA			KELUA				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
QMA	Data dan Informasi Publik	189.233.000	86.770.000	45,85%					
003	Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	94.176.000	43.627.500	46,33%	1	0	Layanan	50,02%	REALISASI BULAN JUNI 2024 SEBESAR 8.33%

B.2.5.2.2 Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhanm dan transformasi pelayanan publik

Pelaksanaannya di antaranya melalui Data dan Informasi Publik program prioritas yaitu Dialog Pasca Pemilu, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu Siaran Dialog Interaktif Dalam Studio; Siaran Dialog Interaktif Luar Studio dan Siaran Pagelaran, yang tersebar di Satuan Kerja LPP RRI Mataram dengan pagu mencapai Rp. 95.057.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.142.500,- Dengan Rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Unit Organisasi	: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Satuan Kerja	: RRI Mataram

Kode	Kegiatan	BELANJA			KELUA				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
QMA	Data dan Informasi Publik	189.233.000	86.770.000	45,85%					
005	Dialog Pasca Pemilu	95.057.000	43.142.500	45,39%	67	38	Layanan	50,98%	REALISASI BULAN JUNI 2024 SEBESAR 0%

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.60.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
yang sudah bentuk kuitansi	45.000.000	-
di brankas	15.000.000	-
-	-	-
Jumlah	60.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah dibelanjakan adalah sebesar 45.000.000

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp4.087.743

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.087.743 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Hutang pajak yang belum disetor	4.087.743,00	-
-	-	-
Jumlah	4.087.743	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Utang pajak yang belum disetor, disetor bulan Juli

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Piutang Bukan Pajak
Rp22.769.700

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp22.769.700 dan Rp36.600.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	769.700	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.000.000	36.600.000
Jumlah	22.769.700	36.600.000

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp16.030.000

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp16.030.000 dan Rp36.600.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	6.000.000	1%	30.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	16.000.000	100%	16.000.000
Jumlah	22.000.000		16.030.000

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp25.839.903

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.839.903 dan Rp24.326.250. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	3.439.903	1.926.250
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	22.400.000	22.400.000
	-	-
Jumlah	25.839.903	24.326.250

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Baik

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
an Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

Debitur	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp109.905.378.000

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp109.905.378.000 dan Rp109.905.378.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	109.905.378.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	109.905.378.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.154 m2	Jl. Langko 83 Ampenan	10.790.763.000
2	19.17 m2	Jl. Majapahit Ekas Ampenan	90.383.522.000
3	500 m2	Aik Bukak Lombok Tengah	218.000.000
4	500 m2	Jl. Raya Medana Tanjung	340.000.000
5	504 m2	Suela Lombok Timur	252.328.000
6	550 m2	Rasane Bima	68.956.000
7	615 m2	Jl. Batu Lanteh Sumbawa	70.049.000
8	500 m2	Jl. Raya Dompu	225.760.000
9	50.000 m2	Tegal Kediri	4.700.000.000
10	5.000 m2	Jl. Tente	2.856.000.000
Jumlah			109.905.378.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp15.895.473.676*

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp15.895.473.676 dan Rp15.772.473.676. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	15.772.473.676
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	15.772.473.676
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(14.237.847.199)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.534.626.477

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0*

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan Bangunan
Rp13.628.607.680*

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.628.607.680 dan Rp13.628.607.680. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	13.628.607.680
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 30 Juni 2024	13.628.607.680
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(5.187.761.696)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	8.440.845.984

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp33.364.000

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.33.364.000 dan Rp.33.364.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	33.364.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	33.364.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(33.364.000)
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Belum
Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp83.555.000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.83.555.000 dan Rp.83.555.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	83.555.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2024	83.555.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(83.555.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp19.542.527.895 dan Rp18.897.138.526. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15.895.473.676	(14.237.847.199)	1.657.626.477
2	Gedung dan Bangunan	13.628.607.680	(5.187.761.696)	8.440.845.984
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.364.000	(33.364.000)	-
4	Aset Tetap Lainnya	83.555.000	(83.555.000)	-
	Akumulasi Penyusutan	29.641.000.356	(19.542.527.895)	10.098.472.461

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

U R A I A N	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2024

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a.

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
Dana Lainnya	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2024	T.A. 2023
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

Aset Lain-lain
Rp325.855.500

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp325.855.500 dan Rp325.855.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	325.855.500
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2024	325.855.500
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024	(325.855.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

-

Mutasi Kurang

-

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 325.855.500

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp325.855.500 dan Rp325.855.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	325.855.500	(325.855.500)	-
-	-	-	-
Total	325.855.500	(325.855.500)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp336.005.706

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp336.005.706 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	336.005.706	-
Total	336.005.706	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Pegawai atas Gaji Induk PNS, PPPK, dan PPNPN Juli 2024 yang belum terbit SP2D, akan terbit di bulan Juli.

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgfdsgjahdfihdsifhshsf

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp3.333.333

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.333.333 dan Rp3.333.333. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2023
	-	-
Total	3.333.333	3.333.333

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pengakuan Pendapatan Sewa atas Tanah Tegal selama 8 bulan atas sewa selama 12 bulan sejak 22 Agustus 2023 sampai 22 Agustus 2024.

Uang Muka dari KPPN Rp60.000.000

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	60.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	60.000.000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Dikarenakan adanya belanja atas pemakaian persediaan dengan kuitansi yang belum dipertanggungjawabkan

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp4.087.743

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.087.743 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	4.087.743	-
	-	-
Total	4.087.743	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang pajak yang belum disetor, akan disetor bulan Juli

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas Rp119.697.091.025

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp119.697.091.025. dan Rp120.547.232.747. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp79.377.640

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp79.377.640 dan Rp74.294.816. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,84. Hal tersebut disebabkan oleh Kenaikan terjadi karena ada kenaikan pendapatan jasa siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting dari tahun sebelumnya, adanya sewa lahan pemancar Tegal. Pendapatan denda dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran PNBPN dari Adira berdasarkan PKS No.71/PKS/RRI-MTR/04/2024.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.627.640	354.816,00	640,56
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	76.710.000	73.940.000,00	3,75
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	40.000	-	-
	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Jumlah	79.377.640,00	74.294.816,00	6,84

Beban Pegawai
Rp4.845.327.047

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.845.327.047 dan Rp4.095.706.490.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 18,30 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Pegawai PPPK dikarenakan adanya penerimaan pegawai PPPK sebanyak 9 Pegawai. Kenaikan Belanja Uang Lembur dikarenakan adanya akun uang lebur kegiatan ramadhan. . Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.059.456.200	1.119.377.820	(5,35)
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.507	16.714	(19,19)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	85.664.750	87.115.798	(1,67)
Beban Tunj. Anak PNS	22.730.304	21.686.386	4,81
Beban Tunj. Struktural PNS	27.045.000	18.095.000	49,46
Beban Tunj. Fungsional PNS	73.758.000	96.303.000	(23,41)
Beban Tunj. PPh PNS	22.274.677	9.562.521	132,94
Beban Tunj. Beras PNS	52.721.760	57.718.740	(8,66)
Beban Uang Makan PNS	91.058.000	113.230.900	(19,58)
Beban Tunjangan Umum PNS	29.005.000	31.970.000	(9,27)
Beban Uang Lembur	32.975.000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	939.012.463	819.426.375	14,59
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	447.957.370	378.326.300	18,41
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	61.261.998	57.926.022	5,76
Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	47.180.000	61.516.000	(23,30)
Beban Gaji Pokok PPPK	883.477.800	585.977.400	50,77
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.141	5.680	201,78
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	62.988.700	43.160.314	45,94
Beban Tunjangan Anak PPPK	19.925.348	15.472.386	28,78
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	124.440.000	89.820.000	38,54
Beban Tunjangan Beras PPPK	61.701.840	48.231.720	27,93
Beban Tunjangan Uang Makan PPPK	111.376.100	64.792.000	71,90
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	589.286.089	375.975.414	56,74
	-	-	-
Jumlah	4.845.327.047	4.095.706.490	18,30

Beban Persediaan
Rp32.551.060

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.551.060 dan Rp59.569.550

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 45,36 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan Beban Persediaan Konsumsi dikarenakan adanya penguncian anggaran pada tahun 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	32.551.060	59.569.550	(45,36)
Jumlah Beban Persediaan	32.551.060,00	59.569.550	(45,36)

Beban Barang dan Jasa
Rp650.902.501

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp650.902.501 dan Rp994.550.818.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 34,55 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya dikarenakan adanya pembukaan anggaran yang sebelumnya dibintang untuk Apresiasi Prestasi Acara PTQ 2024

Penurunan Beban Honor Operasional Satuan Kerja dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	12.837.000	40.541.878	(68,34)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	631.000	1.576.990	(59,99)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.360.000	38.134.000	(28,25)
Beban Barang Operasional Lainnya	7.750.000	42.000.000	(81,55)
Beban Bahan	79.966.000	91.359.628	(12,47)
Beban Langganan Listrik	-	297.790.954	(100,00)
Beban Langganan Telepon	38.674.193	45.911.368	(15,76)
Beban Langganan Air	10.406.800	10.615.000	(1,96)
Beban Sewa	16.800.000	13.000.000	29,23
Beban Jasa Profesi	226.415.000	215.031.000	5,29
Beban Jasa Lainnya	215.662.508	198.590.000	8,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.400.000	-	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	650.902.501	994.550.818,00	(34,55)

Beban Pemeliharaan
Rp371.222.716

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp371.222.716 dan Rp397.217.218.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan Akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya dikarenakan adanya penganggaran untuk Pemeliharaan Tower di Tahun 2024. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	131.715.000	179.334.242	(26,55)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.300.408	89.922.369	20,44
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.650.000	12.000.000	(77,92)
Beban Pemeliharaan Jaringan	13.793.700	20.511.750	(32,75)
Beban Pemeliharaan Lainnya	74.763.608	95.448.857	(21,67)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40.000.000	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	371.222.716	397.217.218	(6,54)

Beban Perjalanan Dinas
Rp108.755.230

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp108.755.230 dan Rp58.286.240

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 86,59 persen disebabkan oleh Kenaikan pada Akun Beban Perjalanan Dinas Paket Meering Luae kota dikarenakan dibukanya akun yang di anggaran tahun sebelumnya dibintang pada tahun 2024 dibuka.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	47.847.230	38.026.240	25,83
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.508.000	20.260.000	30,84
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.400.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	108.755.230,00	58.286.240	86,59

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp645.389.369

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp645.389.369 dan Rp748.465.247.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	319.784.790	454.718.304	(29,67)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	323.221.437	291.363.801	10,93
Beban Penyusutan Irigasi	2.383.142	2.383.142	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	645.389.369	748.465.247	(13,77)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	645.389.369	748.465.247	(13,77)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-1.745.000 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	(1.745.000)	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
		-	-
Jumlah	(1.745.000,00)	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.992.892 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.992.892	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	5.992.892,00	-	-

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.120.547.232.747,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.120.547.232.747,00 dan Rp.120.501.995.551,00

Defisit LO
Rp.6.567.032.391,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.6.567.032.391,00 dan Rp.6.279.500.747,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.18.825.000 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.18.825.000 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Jurnal koreksi atas Penyisihan Piutang. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	18.825.000
	-
Jumlah	18.825.000,0

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.698.065.669 dan Rp.5.277.308.203. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.666.516.501
Diterima dari Entitas Lain	(91.450.832)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	123.000.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	5.698.065.669

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp 5.666.516.501, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 91.450.832

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp123.000.000 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
LCD Monitor	Kantor Pusat	123.000.000
-	-	-
Jumlah		123.000.000

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp119.697.091.025*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.119.697.091.025,00 dan Rp.119.499.803.007,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- LPP RRI Mataram berkedudukan di kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alamat kantor : Jl. Langko 83 Ampenan
- RRI Mataram memiliki 14 rumah dinas; 5 buah di Pemancar Ekas di Jl. Majapahit, 3 buah rumah di Tegal Kediri Lombok Barat, 1 buah rumah di Pemancar Tanjung Lombok Utara, 1 buah di Pemancar Suele Lombok Timur, 1 buah di Pemancar Sumbawa, 1 buah di Pemancar Kabupaten Bima dan 1 buah rumah dinas di Pemancar Dompnu.
- RRI Mataram memiliki sebuah Stasiun Produksi di Bima dengan alamat di Pesanggrahan Donggo (Belakang kantor camat Donggo), kecamatan Donggo